

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PERHUBUNGAN
JL.Jend.Sudirman Km.7 Telp. (0623) 7590080
Tanjungbalai**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 UMUM.....	1
I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
I.3 PERAN ORGANISASI.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
II.1 RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029	6
II.2 VISI DAN MISI	7
II.3 TUJUAN STRATEGIS	9
II.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	9
II.5 PENETAPAN KINERJA 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	12
III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
BAB IV PENUTUP.....	18
IV.1 KESIMPULAN.....	18
IV.2 LANGKAH KEDEPAN.....	18
LAMPIRAN	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
2. PENETAPAN KINERJA	
3. PENGUKURAN KINERJA	
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
5. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029	
6. POHON KINERJA (CASCADING)	
7. KESELARASAN KINERJA	
8. RENCANA AKSI TAHUN 2026	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2025 telah selesai disusun pada Januari 2026 sebagai bagian dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kota maka memandang perlu penyusunan Laporan Kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ini telah disusun yang didalamnya telah disesuaikan dengan mekanisme penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Inti dari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), perencanaan dan penetapan kinerja serta pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan capaian per sasarnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan dan tentunya masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dari berbagai pihak tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Laporan Kinerja dapat tercapai dengan lebih baik lagi dan terarah.

Tanjungbalai, Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



ELVANDIA, S.SiT
PEMBINA TK.I
NIP. 19780111.200312.1.011

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelayanan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kota Tanjungbalai.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governence) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penerapan pencapaian Good governance berlandaskan pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Atas ketentuan hukum diatas, maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai wajib membuat Laporan Kinerja.

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada rencana jangka panjang yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

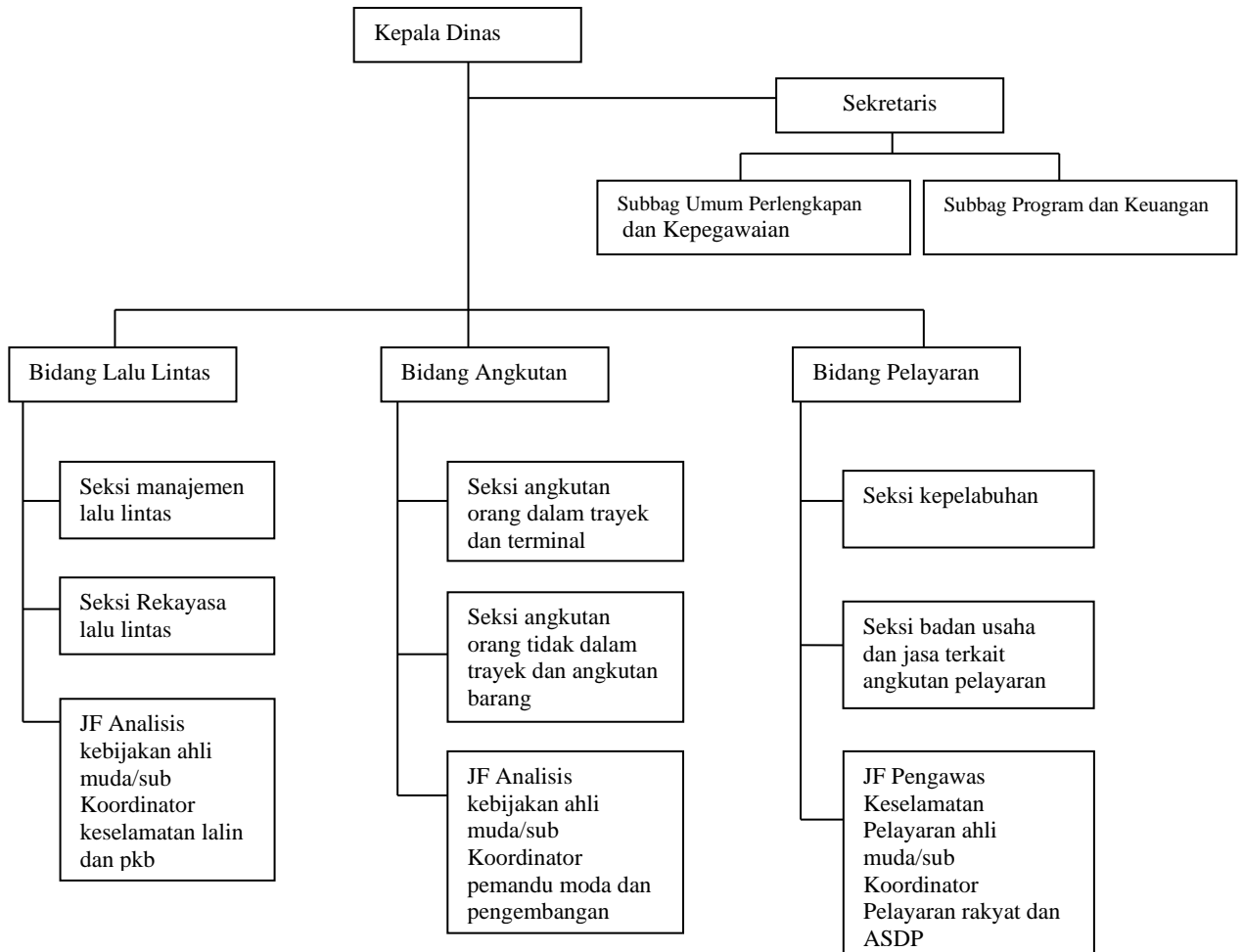
I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 55 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengemban tugas membantu Walikota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan tekhnis bidang perhubungan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan
4. Pemberian dukungan dan koordinasi dengan instansi pelayanan perizinan
5. Penyusunan rencana kebijakan umum, operasional dan evaluasi dibidang perhubungan
6. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, dan Angkutan sungai dan Penyeberangan
7. Pengendalian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas perhubungan
8. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan dinas
9. Pelaksanaan pengaman dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daeerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya

11. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai



I.3 PERAN ORGANISASI

Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berperan dalam pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi dan tugas-tugas pengkoordinasian baik kepada OPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan fungsinya yaitu :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan ASDP;
7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
12. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

19. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan secara khusus memang belum terlihat jelas dikarenakan beberapa faktor diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih kurangnya Pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota sehingga menghambat dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat namun ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan fungsinya yaitu : pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas didalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas sehingga berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas khususnya di jalan raya dalam wilayah Kota Tanjungbalai, yang dilakukan bersama instansi terkait, selain melakukan kegiatan tersebut dan untuk menjalankan program Pemerintah Pusat maupun pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibidang Angkutan yaitu dengan membangun plang kereta api pada perlintasan sebidang di Sei. Raja yang mana pembangunannya menggunakan dana APBD Provinsi, dan tujuan pemabangunan plang kereta api ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2025 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan transportasi Daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor transportasi di dalam upaya mewujudkan Sistem Transportasi Daerah dalam seluruh hirarkinya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2025.



Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan Pembangunan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi Manajemen Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, Renstra dipandang sebagai:

“Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai”

“Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi”

“Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Sebagai “alat” bagi Manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai 2025 - 2029 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta strategi pencapaiannya (Program dan Kegiatan).

II.2 Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisen dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu batasan tersebut Visi Dinas Perhubungan Tanjungbalai dijabarkan sebagai berikut:

“Mewujudkan layanan transportasi yang lancar, tertib, nyaman, aman dan terjangkau menuju Tanjungbalai Emas”.

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Perhubungan yang lancar mengandung arti bahwa Perhubungan yang relatif tidak mempunyai hambatan, cepat dan berkesinambungan;
2. Perhubungan yang tertib mengandung arti bahwa Perhubungan yang memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang – undangan;
3. Perhubungan yang aman mengandung arti bahwa Perhubungan yang relatif tidak ada gangguan, ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut serta terjaminnya keselamatan;
4. Perhubungan yang mendukung Kota Pelabuhan, Pusat Perdagangan dan Industri Regional mengandung arti bahwa Perhubungan yang mempunyai manfaat dan atas keuntungan yang dapat diperoleh secara optimal dengan beban biaya dan resiko serendah mungkin yang pada dasarnya diindikasikan dari beberapa factor antara lain:
 - Ketepatan waktu maupun tiba dan ke tempat tujuan
 - Lamanya waktu tempuh dalam perjalanan dari dan ke tempat tujuan
 - Beban biaya yang relative kecil, Resiko terkecil dalam operasional dan menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan
5. Perhubungan yang mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informatika yang handal mengandung arti menumbuhkembangkan sector komunikasi dan informasi yang selama ini belum ada.

Sebagai upaya pencapaian dalam memenuhi visi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai menjabarkan ke dalam misi Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai Tahun 2029 yaitu :

1. Meningkatkan kondisi dan kualitas prasarana dan sarana Transportasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan transportasi, terutama keselamatan transportasi daerah.
3. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

4. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek.
5. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu.
6. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang ada.
7. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, meningkatkan kemampuan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas serta pembinaan Teknis tentang pelayanan Operasional Transportasi.
8. Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pengelolaan angkutan sungai dan penyeberangan.

II.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah:

“ Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau “

II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari Renstra lima tahunan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari Sasaran, indikator kinerja dan uraian target yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2025.

Untuk tahun 2025 rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

Tabel II.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	- Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	- Jumlah kecelakaan lalu lintas - Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal - Volume perkapasitas jalan - Angkutan umum yang berkeselamatan
			- Meningkatkan kualitas layanan angkutan pelayaran	- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran

II.5 PENETAPAN KINERJA 2025

Dalam penyusunan rencana kerja yang baik, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan sesuai indikator kinerja utama (IKU) yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel.II.2. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	Rasio	0,64
1.1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	57
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	15
		Volume Perkapasitas jalan	Nilai	0,52
		Angkutan umum yang berkeselamatan	Unit	7
1.2	Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Unit	3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2025. Dan semua sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi capaian yang berbeda-beda, seperti tabel dibawah ini:

Tabel.III.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalait
Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	Rasio	0,64	0,66	103
1.1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	57	42	26
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	15	14,37	95
		Volume Perkapasitas jalan	Nilai	0,52	0,40	76
		Angkutan umum yang berkeselamatan	Unit	7	0	0
1.2	Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Unit	3	3	100

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari capaian realisasi dari sasaran strategis, dimana dari enam sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025 ada dua sasaran kinerja yang indikator kerjanya belum maksimal yaitu pada indikator pemasangan rambu-rambu yang hanya terealisasi 14,37 % dan Angkutan umum yang berkeselamatan terealisasi 0%. Berikut ini permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi dari target capaian indikator kinerja dinas perhubungan:

a. Jumlah kecelakaan lalu lintas

Pada indikator ini terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 26% dari tahun 2024, hal ini diakibatkan jumlah angka kecelakaan tahun 2025 hanya menurun rendah dari jumlah angka kecelakaan tahun 2024, yang mana menurut data dari kepolisian Kota Tanjungbalai, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 sebanyak 57 kasus, sedangkan tahun 2025 angka kecelakaan sebanyak 42 kasus. Jadi terjadi penurunan angka kecelakaan sebanyak 15 kasus dari tahun sebelumnya, Jadi Penurunan angka kecelakaan Tahun 2025 sebesar 26%. Hal ini diakibatkan:

1. Banyaknya Fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic light yang sudah tidak berfungsi, dan fasilitas rambu lain yang tidak memadai.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia.

b. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal.

Jumlah kebutuhan rambu kota tanjungbalai sebesar 3820 unit rambu, Pada tahun 2024 jumlah rambu yang ada sebanyak 549 unit rambu (14,37%). Pada Tahun 2025 Target rambu yang terpasang sebesar 15% (573 rambu). Disebabkan adanya efisiensi anggaran, maka anggaran pengadaan rambu pada Perubahan APBD tahun 2025 di hapus , sehingga

persentase jumlah rambu yang terpasang di tahun 2025 sama seperti Tahun 2024.

c. Volume Perkapasitas jalan.

Pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai 0,87 v/c. Sedangkan Pada Tahun 2025 realisasi yang dicapai 0,40 v/c dari target 0,52 v/c atau terealisasi 76%, Jadi Terjadi penurunan volume arus lalu lintas. Dari hasil Analisa data ruas jalan di 7 titik pada kota Tanjungbalai didapat ruas jalan yang memiliki V/C Rasio tertinggi berada di ruas jl.besar Teluk Nibung yaitu 0,56 V/C dengan tingkat pelayanan jalan yaitu C, dan ruas jalan yang memiliki V/C terendah berada di ruas JL. Jend. Sudirman yaitu 0,26 dengan tingkat pelayanan jalan B. Ruas jl.Besar Teluk Nibung memiliki V/C Ratio tertinggi dikarenakan ruas jalan tersebut merupakan Kawasan perdagangan ikan dan merupakan salah satu akses yang menuju langsung ke stasiun kereta api dan Pelabuhan. Dan dari hasil Analisa data ruas jalan di 7 titik lokasi kota Tanjungbalai V/C Rasio rata-rata didapat 0,40.

d. Angkutan umum yang berkeselamatan.

Pada Tahun 2025 target angkutan umum yang berkeselamatan sebanyak 7 unit, Realisasinya hingga akhir tahun 2025 sebanyak 0 unit, hal ini diakibatkan oleh: tidak adanya alat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan kota Tanjungbalai, sehingga tidak dapat melakukan pengujian kendaraan angkutan umum. Kedepan Dinas Perhubungan berupaya didalam pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, sehingga dapat melakukan pemeriksaan angkutan umum yang berkeselamatan.

e. Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran.

Pada Tahun 2025 target realisasi Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran sebesar 3 unit, Realisasinya sampai dengan akhir tahun masih tetap sama dengan tahun 2024 sebesar 3 unit, tidak terjadi penambahan unit, hal ini diakibatkan oleh kurangnya anggaran Dinas Perhubungan, sehingga penambahan saran dan prasarana penunjang angkutan pelayaran tidak tercapai.

Dari sisi realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 Dinas Perhubungan memiliki anggaran sebesar **Rp. 6.411.539.928** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.220.069.797** dan nilai capaian keberhasilan sebesar **97,01%**. Program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	KINERJA		%	ANGGARAN		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	100	3.323.200	3.323.200	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	1 lap	100	2.037.400	2.037.400	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Asn	37 Asn	100	3.903.232.460	3.796.846.616	97,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100	1.984.800	1.984.800	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	1 lap	100	1.420.000	1.420.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100	4.000.000	3.996.200	99,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100	44.501.700	40.653.811	91,35
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100	12.739.000	12.200.000	95,77
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	27.500.000	27.487.180	99,95

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	34.690.800	28.582.000	82,391
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dok	1 dok	100	4.992.500	3.100.000	62,09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 lap	26 lap	100	53.848.000	53.842.540	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 lap	300 lap	100	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	12 lap	100	62.178.268	50.876.301	81,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	1 lap	100	43.300.000	40.750.380	94,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	12 lap	100	1.362.396.600	1.338.050.245	98,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	43.330.400	43.134.539	99,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit	19 unit	100	240.882.800	226.491.504	94,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2 unit	2 unit	100	57.890.000	54.486.400	94,12
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 lap	12 lap	100	504.292.000	487.806.681	96,73
				6.411.539.928	6.220.069.797	97,01

Pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas perhubungan tahun 2025 semua terealisasi dengan persentase realisasi rata-rata diatas 90 %, hal ini diakibatkan pekerjaan yang dilakukan lebih banyak bersifat rutin, sehingga pekerjaan teknis yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator dinas perhubungan belum tercapai, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan masih minim dalam hal penganggaran.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai sudah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban seperti yang disebutkan pada Point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja.
4. Dalam pencapaian sasaran , dari 2 sasaran strategik yang ditetapkan, seluruhnya dapat dilaksanakan, namun tingkat keberhasilan belum semuanya tercapai 100 %, hal ini lebih disebabkan keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

IV.2 LANGKAH KEDEPAN

Langkah – langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai adalah :

1. Melakukan suatu perencanaan yang matang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
2. Membuat suatu usulan kegiatan yang sejalan dengan program – program dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Propinsi untuk mengusulkan anggaran yang dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi.

4. Melaksanakan program – program yang berskala prioritas agar pelayanan jasa transportasi akan terwujud.
5. Membuat suatu peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
6. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM dibidang perhubungan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Bidang Perhubungan
		Jumlah penanganan titik rawan kemacetan	Jumlah titik rawan kemacetan	Bidang Perhubungan
		Jumlah angka kecelakaan	Jumlah angka kecelakaan	Sat Lantas Polres Tanjungbalai
		Angkutan umum yang berkeselamatan	Jumlah unit angkutan	Bidang Perhubungan
2	Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Bidang Perhubungan

Tanjungbalai, Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



F. VANDIA, S.SIT
PEMBINA TK.I
NIP.19780111.200312.1.011

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	57	42	26
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	15%	14,37	95
		Volume Perkapasitas jalan	Nilai	0,52	0,52	100
		Angkutan umum yang berkeselamatan	Unit	7	5	71
2	Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana	Unit	3	3	100

Tanjungbalai, Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



ELVANDIA, S.SiT
PEMBINA TK.I
NIP.19780111.200312.1.011